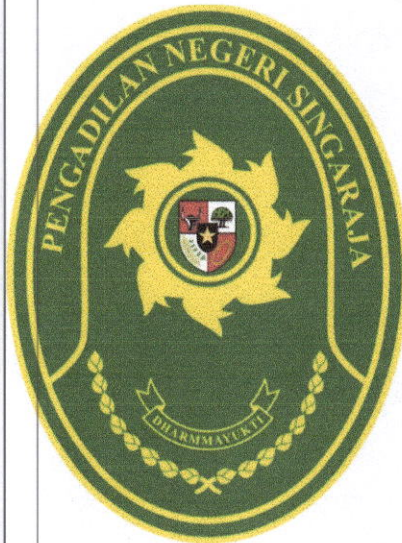


PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB
Jalan Kartini No. 02 Singaraja

Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id - Email : psingaraja@yahoo.co.id

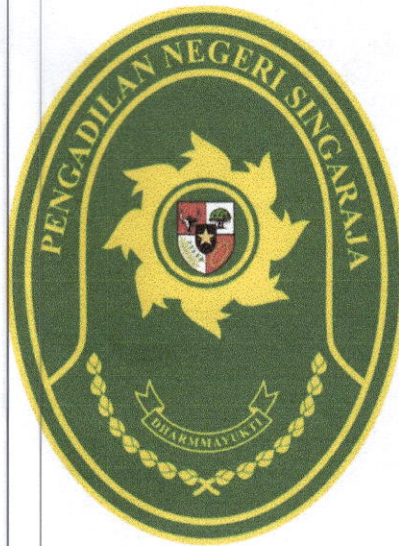
SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN I



Disusun Oleh :

TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

TAHUN 2025



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEY INDEKS
PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN I

PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

Disahkan di Singaraja

Pada Tanggal 27 Maret 2025

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja,



I Made Bagiarta *f*

Koordinator Tim Survey,



I Nengah Karyasa

KATAPENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, guna tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang akan dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Singaraja mengadakan survey ini.

Survey ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani. Survey ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Singaraja, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survey dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Singaraja dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Singaraja.

Singaraja

27 Maret 2025

Koordinator Tim Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi,

The image shows the official seal of the Pengadilan Negeri Singaraja (District Court of Singaraja). The seal is circular with a blue border containing the text 'PENGADILAN NEGERI SINGARAJA'. Inside the seal, there is a central emblem featuring a sun and a scale of justice. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'I Nengah Karyasa'. Below the signature, the name 'I Nengah Karyasa' is printed in black text.

I Nengah Karyasa

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI.....	iv	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Maksud dan Tujuan	2	
1.3 Landasan Hukum	2	
1.4 Sasaran Kerja.....	3	
1.5 Rencana Kerja.....	3	
BAB II METODOLOGI		
2.1 Metode penelitian.....	5	
2.2 Populasi dan Sampel.....	5	
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisa.....	5	
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	5	
2.5 Teknik Analisa Data.....	6	
2.6 Tahap Pelaksanaan.....	6	
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI		9
3.1 Profil Responden.....	9	
3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator.....	11	
3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	16	
BAB IV PENUTUP		18
4.1 Kesimpulan.....	18	
4.2 Saran	19	
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian/ Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju. Wilayah

Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survey (SISUPER) Pada Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya

1.4.Sasaran Kerja

1. Terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

1.5. Rencana Kerja

1.5.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
Penyiapan Bahan
 - a) Kelengkapan peralatan survey
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a) Jumlah Responden.
 - b) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- Penyusunan Jadwal
 - a) Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

1.5.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.5.3 Metode Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu 3 bulan sekali.

BAB II METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Singaraja. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Singaraja. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka melalui aplikasi SI SUPER. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu sepuluh minggu dan dengan jumlah data minimal 110 (seratus

sepuluh) responden. Selanjutnya data yang masuk dalam aplikasi SISUPER di ambil data ADK (Arsip data Komputer).

2.5 Teknik Analisis Data

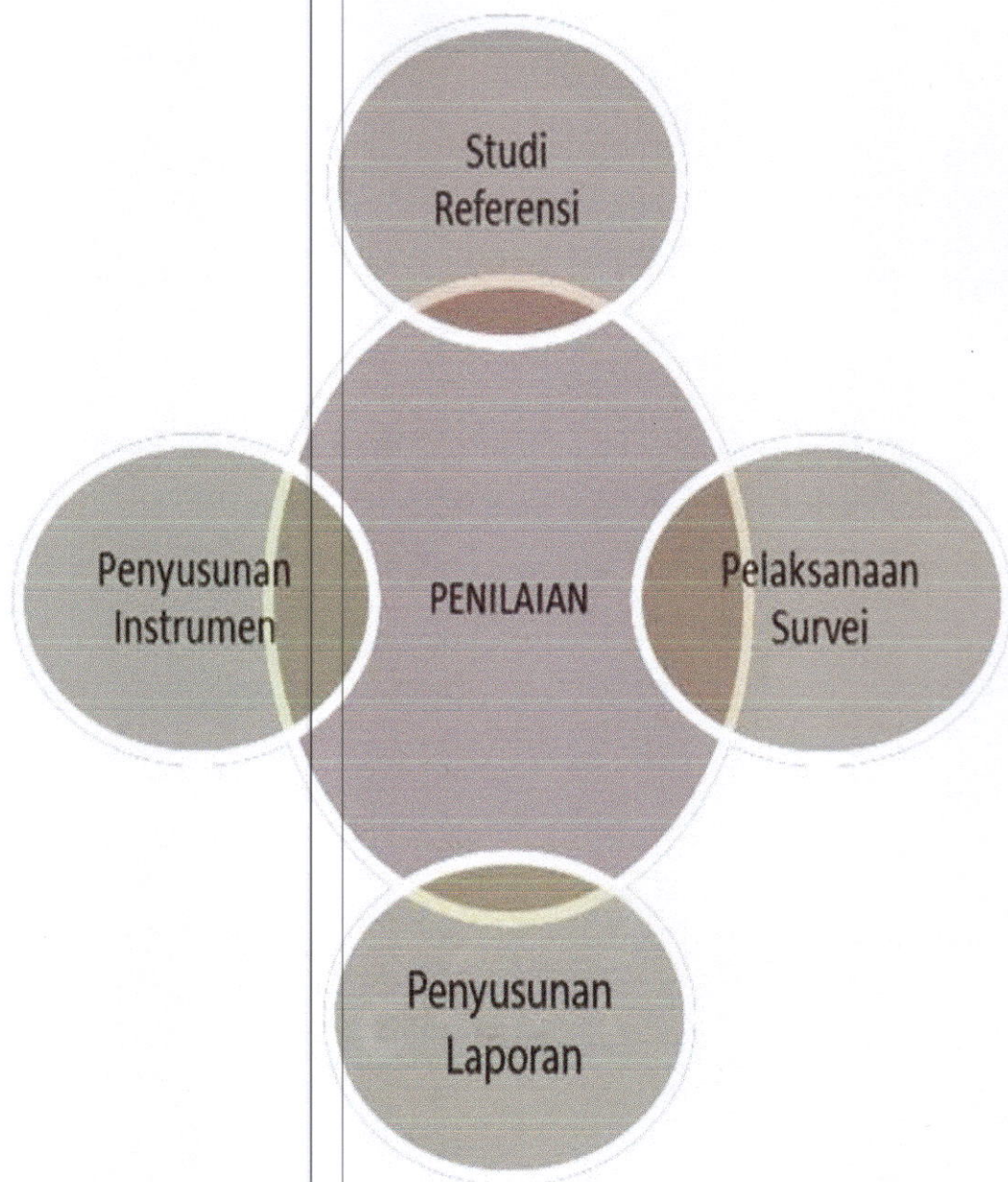
Analisis data untuk menentukan korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut: *Pertama*, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6 Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1

Model Alur Penyusunan Survey IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 1
Ruang Lingkup Survey Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2
Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25 - 43.75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76-62.50	43.76-62.50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51-3.25	62.51 -81.25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	A	Bersih dari Korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil Responden

3.1.1 Umur Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu usia 29 sampai dengan 39 tahun. Bagi kelompok usia di atas 39 tahun jumlah responden semakin mengecil.

Tabel 3
Umur Responden

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1.	18 Tahun s/d 28 Tahun	24	14,37%
2.	29 Tahun s/d 39 Tahun	87	52,10%
3.	40 Tahun s/d 49 Tahun	44	26,35%
5	50 Tahun s/d 59 Tahun	11	6,59%
6	>59 Tahun	1	0,60%
Jumlah		167	100%

3.1.2 Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan jenis kelamin yaitu Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki.

Tabel 4
Jenis Kelamin Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-Laki	107	64,07%
2	Perempuan	60	35,93%
Jumlah		167	100%

3.1.3 Pendidikan Terakhir Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Singaraja mayoritas memiliki latar Sekolah Menengah Atas serta Strata Satu yang menduduki peringkat kedua.

Tabel 5
Pendidikan Terakhir Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Tidak sekolah/SD	2	1,20%
2	SMP	20	11,98%
3	SMA	104	62,26%
4	Diploma	15	8,98%
5	S1	25	14,98%
6	S2	1	0,60%
7	S3	0	0,00%
Jumlah		167	100%

3.1.4 Pekerjaan Utama Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 39,52% responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pekerjaan lainnya yang berjumlah 66 orang dari total responden 167 orang. Responden yang memiliki pekerjaan lainnya menduduki peringkat kedua.

Tabel 6
Pekerjaan Utama Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	PNS	3	1,80%
2	TNI/POLRI	7	4,19%
3	Swasta	47	28,14%
4	Wirausaha	31	18,57%
5	Tenaga Kontrak	13	7,78%
6	Pekerja lainnya	66	39,52%
Jumlah		167	100%

3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,982 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 7
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Tidak sesuai prosedur	1	0	0,00%	3,982
2	Jarang sesuai prosedur	2	0	0,00%	
3	Sering sesuai prosedur	3	3	1,80%	
4	Selalu sesuai prosedur	4	164	98,20%	
Jumlah			167	100%	

3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 8
Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu meminta imbalan	1	0	0,00%	4,000
2	Sering meminta imbalan	2	0	0,00%	
3	Jarang meminta imbalan	3	0	0,00%	
4	Tidak meminta imbalan	4	167	100%	
Jumlah			167	100%	

3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,988 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 9
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	3,988
2	Sering	2	1	0,60%	
3	Jarang	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	166	99,40%	
Jumlah			167	100%	

3.2.4 Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,988 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 10
Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	3,988
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang	3	2	1,20%	
4	Tidak pernah	4	165	98,80%	
Jumlah			167	100%	

3.2.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,976 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 11
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	1	0,60%	3,976
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang	3	1	0,60%	
4	Tidak pernah	4	165	98,80%	
Jumlah			167	100%	

3.2.6 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,976 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 12
Indeks pada Indikator Hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	1	0,60%	3,976
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang/pernah	3	1	0,60%	
4	Tidak pernah	4	165	98,80%	
Jumlah			167	100%	

3.2.7 Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,994 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 13
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	3,994
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang	3	1	0,60%	
4	Tidak pernah	4	166	99,40%	
Jumlah			167	100%	

3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja sangat Bersih dan bebas dari Korupsi.

Tabel 14
Indeks pada Indikator Percaloan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang/pernah	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	167	100%	
Jumlah			167	100%	

3.2.9 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,988 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dan bebas dari Korupsi.

Tabel 15
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	3,988
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang/pernah	3	2	1,20%	
4	Tidak pernah	4	165	98,80%	
Jumlah			167	100%	

3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 16
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang/pernah	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	167	100%	
Jumlah			167	100%	

3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja sebesar **3,99/99,73%**

Tabel 17

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja

No	Ruang Lingkup	Nilai rata-rata IPK	IPK Tertimbang
1	Manipulasi Peraturan	3,982	0,398
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	0,400
3	Menjual Pengaruh	3,988	0,399
4	Transaksi Biaya	3,988	0,399
5	Biaya Tambahan	3,976	0,398
6	Hadiah	3,976	0,398
7	Tranparansi Biaya	3,994	0,399
8	Percaloan	4,000	0,400
9	Perbuatan Curang	3,988	0,399
10	Transaksi Rahasia	4,000	0,400
Jumlah		39,892	3,989
INDEKS PERSEPSI KORUPSI			3,99 / 99,73%

Dari tabel di atas bahwa Indeks Pengadilan Negeri Singaraja dengan nilai **39,892** jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka interval 3.26-4.00./ Nilai Interval Konversi IPK 81.26-100.00.

Tabel 18

Persepsi Korupsi

Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25,00-43.75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	A	Bersih dari Korupsi



KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NOMOR : 022 /KPN/SK.HM1/1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) serta mendukung Reformasi Birokrasi Pengadilan dan adanya mutasi pejabat, maka perlu dibentuk Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Singaraja yang baru;
 - b. Bahwa komitmen tersebut tercantum dalam amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani;

- c. Bahwa tujuan diadakannya survei untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna pengadilan;
- d. Bahwa sasaran diadakannya survei adalah:
 - 1) mendorong partisipasi pengguna pengadilan sebagai pengguna layanan pengadilan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan,
 - 2) mendorong penyelenggara pelayanan pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
 - 3) mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan pengadilan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
-

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 Sekaligus Dalam Upaya Memenuhi Persyaratan Untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 518/DJU/SK/OT01.3/4/2023 Tentang Pengisian Survey Mandiri Zona Integritas Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA TENTANG TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 070/KPN/SK.HM1/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Singaraja.

- KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Singaraja.
- KETIGA : Tim survei secara bertahap menyampaikan kepada Ketua, mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan tahap penyajian hasil survei.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,


I MADE BAGIARTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
NOMOR : 022 / KPN/SK.HM1/I/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NO	NAMA, PANGKAT/GOL RUANG & NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	I MADE BAGIARTA, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA TK I (IV/b) NIP. 197702012002121004	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2	I NENGAH KARYASA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 197002091993031005	PANITERA MUDA HUKUM	KOORDINATOR
3	IDA BAGUS MADE SWARJANA NARAPATI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 197308241994041001	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
4	KADEK DARNA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198008052007041001	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
5	KETUT SUMAWAN, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 196910141993031004	KA. SUBBAG UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA
6	I MADE SATRYAWAN, S.E. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 197205132006041003	JURUSITA	ANGGOTA
7	NI MADE ANDINI NOVITASARI, A.Md., S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198111212006042001	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
8	NI MADE AYU RASTITI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199512292019032013	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
9	TITIK KURNIYATI, A.Md. Pangkat/Gol Ruang: PENGATUR (II/c) NIP. 199701132022032010	KLEREK - PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	SEKRETARIS

Ditetapkan di Singaraja

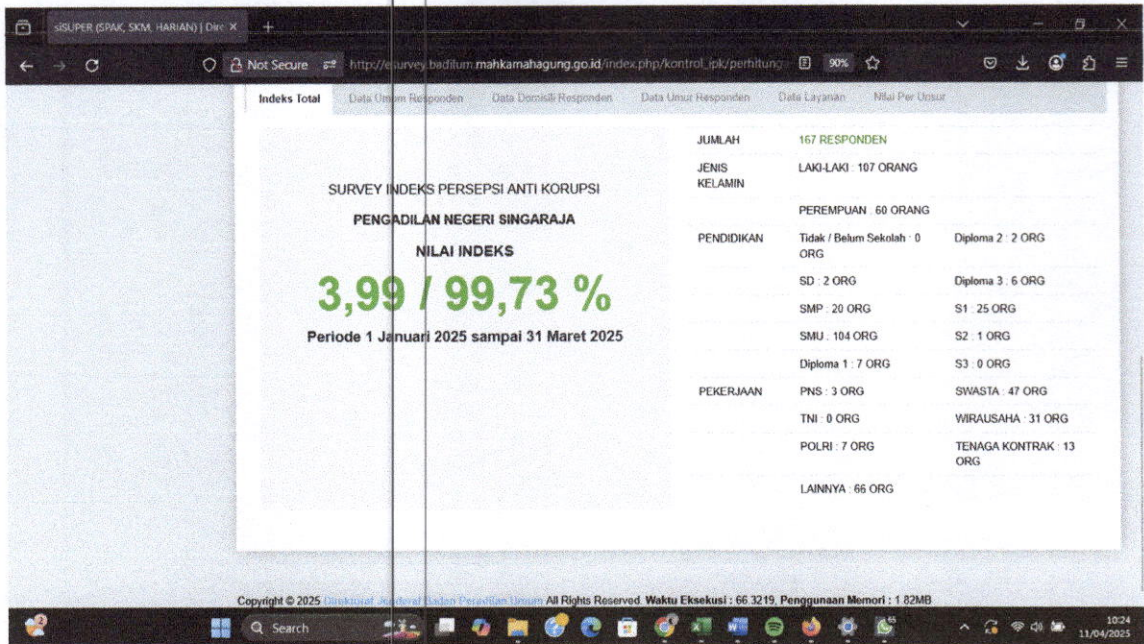
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,



I MADE BAGIARTA

NILAI SIPAK DALAM APLIKASI SISUPER



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Singaraja diperoleh informasi bahwa Pengadilan Negeri Singaraja memiliki nilai Indeks Persepsi Korupsi tertimbang 3,99 (99,73%) atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,982
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,988
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,988
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,976
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,976
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,994
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,988
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000.

Tiga unsur terendah Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi yaitu:

1. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks nilai 664 dengan indeks sebesar 3,976.
2. Indikator Hadiah, mendapat indeks nilai 664 dengan indeks sebesar 3,976.
3. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks nilai 665 dengan indeks sebesar 3,982.

Tiga unsur tertinggi Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi yaitu:

1. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks nilai 668 dengan indeks sebesar 4,000.
2. Indikator Percaloan, mendapat indeks nilai 668 dengan indeks sebesar 4,000.
3. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat nilai 668 dengan indeks sebesar 4,000.

4.2 Saran

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Singaraja Triwulan I Tahun 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja masuk kategori kinerja **Bersih dari Korupsi**. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transaksi Biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Maka perlu ditekankan kembali bahwa dalam pelayanan di Pengadilan Negeri Singaraja sangat transparan, tanpa perantara oknum tertentu dan mudah dalam memperoleh informasi mengenai tarif/biaya baik melalui website maupun melalui petugas PTSP. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan persepsi atau anggapan korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Singaraja.

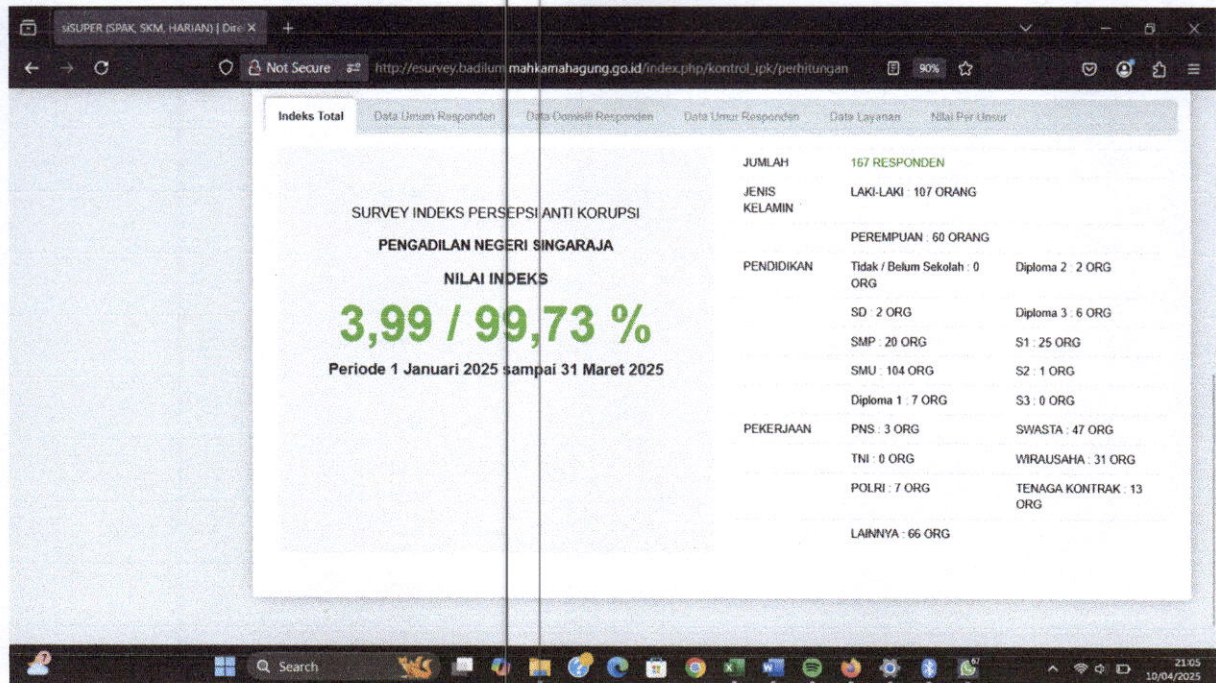
LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK PEMBENTUKAN TIM SURVEY

2. PERHITUNGAN INDEKS

- **NILAI INDEKS**
- **DATA RESPONDEN**
- **NILAI PER UNSUR**

Lampiran : Nilai Indeks



	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekap
	MAHARDIKA R-099794-IPAK- 3AA55CB6EA No. HP 0859106992260		Laki-laki												Febru 2025
72	Komang Endang Lestari R-099794-IPAK- 299A6BA4AF No. HP 08970125153	BALI	48 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Febru 2025
73	GUSTI NYOMAN JATI PERMANA R-099794-IPAK- C2F72FC647 No. HP 087863240496	BALI	40 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Febru 2025
74	Kadek Septiariani R-099794-IPAK- EA8E0ECAE4 No. HP 081953973041	BALI	22 Tahun Perempuan	SMPLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Febru 2025
75	Ni Luh Putu Wirawidyantari R-099794-IPAK- 8B72378424 No. HP 083893220565	BALI	23 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Febru 2025
76	Agus Astra Bawa R-099794-IPAK- CB03FFCBAD No. HP 081915606595	BALI	35 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Febru 2025
77	Putu Andrius R-099794-IPAK- CB0497DABB No. HP 081237593463	BALI	36 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Febru 2025
78	Dimas Aditya Rahman R-099794-IPAK- 93FF72F677 No. HP 085847616440	BALI	22 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Febru 2025
79	Ida Bagus Anggara Parna R-099794-IPAK- 1D25A846D5 No. HP 087762699696	BALI	32 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Febru 2025
80	Ida Bgs Ngurah Astawa W R-099794-IPAK- 2B8BCE4E62 No. HP 081338561234	BALI	51 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Febru 2025

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekan
81	PUTU SARWA ADA R-099794-IPAK-8F3AD7E383 No. HP 81935663093	BALI	44 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Febru 2025
82	Ida Bagus Anggara Parna R-099794-IPAK-FE906421FE No. HP 87762699696	BALI	30 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Febru 2025
83	VITA DEBORA POLII R-099794-IPAK-EA34FE22E0 No. HP 85855095305	BALI	34 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Febru 2025
84	Muhammad Afandi Zainal R-099794-IPAK-143EC26BD5 No. HP 82340335493	BALI	40 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 Febru 2025
85	Nym Wardana R-099794-IPAK-243F8518D2 No. HP 087762753003	BALI	35 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 Febru 2025
86	Ida Bagus Anggara Parna R-099794-IPAK-873EE10299 No. HP 087762699696	BALI	30 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Febru 2025
87	PANDE PUTU ARI APSARI R-099794-IPAK-7BCDB9EF2E No. HP 083115046511	BALI	32 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Febru 2025
88	PUTU BELY DEVAYANI R-099794-IPAK-B5E991F82D No. HP 83117281117	BALI	26 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Febru 2025
89	Gede Maha Wijaya R-099794-IPAK-9C70C0C1B3 No. HP 083114219515	BALI	43 Tahun Laki-laki	S1WIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Febru 2025
90	Sri R-099794-IPAK-3DFC3A98F1 No. HP 082339611584	BALI	20 Tahun Perempuan	S1LAINNYA	4	4	4	3	1	1	3	4	3	4	14 Febru 2025

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekan
91	Putu Desi Purnama Sari R-099794-IPAK-F15CB4AE94 No. HP 081805693099	BALI	34 Tahun Perempuan	SMPLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 Februari 2025
92	Wardana R-099794-IPAK-830A00442F No. HP 087762753003	BALI	35 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Februari 2025
93	Putu Gede Sudarma R-099794-IPAK-777A2E6A13 No. HP 81353688694	BALI	31 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Februari 2025
94	Made Merta Sariada R-099794-IPAK-F16342B300 No. HP 083117343142	BALI	36 Tahun Laki-laki	Diploma 3SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Februari 2025
95	Lukman Hakim R-099794-IPAK-9DC7A4B929 No. HP 085231242677	BALI	37 Tahun Laki-laki	Diploma 3SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Februari 2025
96	I Wayan Asmarajaya R-099794-IPAK-5AC019FF45 No. HP 081226659187	BALI	39 Tahun Laki-laki	SMPLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Februari 2025
97	Komang Suparmi R-099794-IPAK-B920D7D2EC No. HP 83141973660	BALI	48 Tahun Perempuan	SDLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Februari 2025
98	Nym Wardana R-099794-IPAK-E06EB51AEA No. HP 087762753003	BALI	35 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Februari 2025
99	Luh Kartini R-099794-IPAK-007C746B95 No. HP 081774972274	BALI	43 Tahun Perempuan	SMUWIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 Januari 2025
100	Gde Aryadi R-099794-IPAK-8A5EA68EC9 No. HP 08813681314	BALI	39 Tahun Laki-laki	SMUWIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 Januari 2025
101	I NYOMAN ANOM SUARSANA	BALI	55 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 Januari 2025

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekap
	R-099794-IPAK-852999E770 No. HP 087860702313														2025
152	Surya Mahesa R-099794-IPAK-B2552B1B8E No. HP 08174780493	BALI	35 Tahun Laki-laki	\$MUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Januar 2025
153	Luh Eka Murniati R-099794-IPAK-D163BED1A9 No. HP 085706061885	BALI	43 Tahun Perempuan	\$MUWIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Januar 2025
154	I GEDE SADIA DANA R-099794-IPAK-F81BC1C5A2 No. HP 85739165330	BALI	32 Tahun Laki-laki	\$DLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Januar 2025
155	Putu Kariana R-099794-IPAK-85DC8D3463 No. HP 081999274209	BALI	47 Tahun Laki-laki	\$MUTENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Januar 2025
156	Gede Ananda Permadi R-099794-IPAK-A236A034DA No. HP 083838437312	BALI	30 Tahun Laki-laki	\$MUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januar 2025
157	Kadek Ina Estriyoni R-099794-IPAK-76512AE36D No. HP 081237038628	BALI	37 Tahun Perempuan	\$ISWASTA	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januar 2025
158	Luhsamiasih R-099794-IPAK-C2EFA428B8 No. HP 0881038154232	BALI	54 Tahun Perempuan	\$MULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januar 2025
159	Luh Yuliskayani R-099794-IPAK-92EC8192D2 No. HP 082340331633	BALI	30 Tahun Perempuan	\$ISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 Januar 2025
160	Putu Gede Resa Cahya Supaela R-099794-IPAK-0436FC0B2B No. HP 081936034464	BALI	35 Tahun Laki-laki	Diploma 3SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 Januar 2025
161	Luh Putu Mas Suka Arini R-099794-IPAK-0CBC8F782D	BALI	43 Tahun Perempuan	\$ISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 Januar 2025

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekar
	No. HP 082144653912														
162	I Nyoman Karika R-099794-IPAK- 0594C161E7 No. HP 085237602085	BALI	60 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	6 Januar 2025
163	Kadek Ayu Nopiani R-099794-IPAK- 404B5AC2E4 No. HP 081952477091	BALI	33 Tahun Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Januar 2025
164	KOMANG ASIH MARLYANI R-099794-IPAK- FE366EDEBF No. HP 87762442207	BALI	33 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Januar 2025
165	Dewa Made Yudi Hermawan R-099794-IPAK- C79D5E69E4 No. HP 81933025333	BALI	38 Tahun Laki-laki	Diploma 3LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Januar 2025
166	I Nengah Muliarta R-099794-IPAK- 9C0AC9478E No. HP 08174736293	BALI	33 Tahun Laki-laki	SMUTENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Januar 2025
167	Luh Hendra Kusuma Dewi R-099794-IPAK- 2D7605CAF5 No. HP 081936316849	BALI	48 Tahun Laki-laki	SMUWIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Januar 2025

